

PEMBANGUNAN AGROESTAT KELAPA SAWIT DALAM UPAYA PERCEPATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN

Pendahuluan

Sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian negara, maka pemberdayaan ekonomi rakyat juga berarti membangun ekonomi pertanian lebih baik. Pembangunan industri harus memperhatikan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dengan sektor pertanian atau sektor primer sedangkan keterkaitan ke depan (*forward linkage*) harus memperhatikan pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dan pemasaran yang baik sehingga produk yang dihasilkan tidak sia-sia. Konsep pengembangan pertanian ini disebut dengan konsep agribisnis.

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama di sektor pertanian maka dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Pengembangan ekonomi kerakyatan bagi pemerintah Daerah Riau dilaksanakan melalui program pengetasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pembangunan infrastruktur. Program ini lebih dikenal dengan K2I (Kebodohan, Kemiskinan, dan Infrastruktur). Setiap pembangunan di daerah tidak terlepas dari program K2I yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pembangunan daerah dengan program K2I sangat ditentukan oleh potensi yang dimiliki oleh suatu daerah,

maka kebijaksanaan yang dibuat oleh pemerintah daerah harus mengacu kepada potensi daerah yang berpeluang untuk dikembangkan. Potensi tersebut antara lain: 1) pengembangan tanaman hortikultura; 2) tanaman perkebunan; 3) usaha perikanan; 4) usaha peternakan; 5) usaha pertambangan; 6) sektor industri; dan 7) potensi keparawisataan.

Dalam upaya penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat keharusan (*necessary condition*), yang menjamin iklim makro yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian. Untuk penguatan ekonomi rakyat secara riil, diperlukan syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian. Sektor agribisnis sebagai sektor ekonomi rakyat masih memiliki prospek yang cerah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik untuk memperkuat ekonomi rakyat, maupun sebagai andalan Indonesia dalam perdagangan bebas (Bungaran Saragih, 2001a),

Pengembangan sektor pertanian dalam arti luas harus diarahkan kepada sistem agribisnis dan agroindustri, karena pendekatan ini akan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.

Kesenjangan Ekonomi Masyarakat

Pertumbuhan ekonomi yang kita pacu selama ini belum mencerminkan distribusi pendapatan yang adil dan merata, karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini hanya dinikmati oleh sekelompok kecil masyarakat, seperti masyarakat perkotaan, sedangkan masyarakat pedesaan atau pinggiran mendapat porsi yang kecil dan tertinggal. Masih terjadi kesenjangan (disparitas) terutama antar daerah dan sektor serta antar golongan masyarakat.

Kesenjangan antar daerah ini paling menyolok adalah antara daerah pengembangan kawasan industri dengan kawasan pengembangan pertanian. Daerah pengembangan pertanian tersebut mata pencarian pokok masyarakatnya hanya bergantung kepada pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia yaitu, perkebunan, mencari kayu, nelayan, dan petani tradisional (subsisten).

Kesenjangan ini akan diperburuk karena adanya kesenjangan dalam pembangunan antar sektor, terutama antara sektor pertanian (basis ekonomi pedesaan) dan nonpertanian (basis ekonomi perkotaan). Kesenjangan ini akan berakibat pada tingkat kesejahteraan berbagai kelompok masyarakat. Jika masalah ini tidak ditangani secara serius, maka kesenjangan antar kota dan pedesaan akan semakin parah, sehingga daerah-daerah tertinggal akan semakin banyak ditemui. Kesenjangan ini cukup berbahaya karena menyimpan potensi konflik kerusuhan dan kecemburuan sosial (Almasdi Syahza, 2002a).

Adanya daerah-daerah tertinggal ini tidak hanya membawa kemiskinan bagi masyarakat, tetapi dalam jangka panjang akan menyebabkan daerah tertinggal akan semakin tertinggal sementara yang maju akan tetap semakin maju dengan percepatan yang semakin tinggi dan sulit dikejar. Penyebabnya adalah perbedaan sumberdaya manusia (SDM), pertumbuhan awal dan hasil pembangunan yang secara akumulatif mendorong pertumbuhan selanjutnya, sehingga akselerasi pembangunan di kedua daerah akan tetap berbeda. Kesenjangan ini hanya dapat diatasi melalui campur tangan pemerintah dengan cara mengkatrol daerah tertinggal sehingga basis perekonomian menjadi terangkat untuk memacu pertumbuhan dan bersaing dengan daerah lain.

Secara teoritis meningkatnya kesenjangan antar daerah atau antar masyarakat disebabkan oleh banyak faktor, antara lain: kurangnya pendidikan dan keterampilan, tidak memiliki faktor produksi seperti tanah dan modal, tidak adanya akses terhadap permodalan dan pemasaran hasil pertanian. Kekurangan tersebut akan menyebabkan

rendahnya kemampuan berproduksi, sehingga akan berakibat rendahnya pendapatan keluarga (Almasdi Syahza, 2001). Bagi masyarakat di Daerah Riau, kebijakan pemerintah daerah saat ini adalah melaksanakan program K2I yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, meningkatkan kepemilikan modal (faktor produksi) serta membangun infrastruktur sebagai penunjang ekonomi di pedesaan.

Guna mengatasi kesenjangan antara daerah-daerah tertinggal dan maju ini pemerintah melakukan berbagai usaha untuk mengkatrol daerah tertinggal sekaligus memberdayakan keluarga miskin (petani), antara lain: dengan memacu pertumbuhan ekonomi melalui bantuan modal, meningkatkan pendidikan dan keterampilan, memberikan bimbingan dan pelatihan. Pada sektor pertanian, dikenal bermacam-macam jenis kredit untuk membantu permodalan usaha pertanian, perikanan, dan perkebunan. Namun usaha yang dilakukan tersebut belum mampu mengangkat kesejahteraan rakyat, khususnya masyarakat pedesaan. Untuk itu perlu adanya terobosan melalui pemberdayaan ekonomi rakyat. Terobosan ini dilakukan harus disesuaikan dengan potensi masyarakat dan ketersediaan sumberdaya yang ada, misalnya bantuan modal dan pendampingan untuk membantu pemasaran dan manajemen produksi.

Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Krisis ekonomi pada masa lalu menyebabkan pemerintah dan para pengambil kebijakan kembali berpikir ulang tentang arah perekonomian yang selama ini ditempuh. Kini timbul kemauan politik yang kuat untuk membenahi inefisiensi dan mis-alokasi sumberdaya (*misallocation of resources*) yang terjadi di sektor ril yang selama ini dibiarkan saja terjadi karena kuatnya *vested interest* para pemburu *rente* yang menguasai birokrasi pemerintahan. Akibat dari mis-alokasi sumberdaya adalah terabaikannya pembangunan pertanian dan industri yang

berbasis sumberdaya alam serta sumberdaya pertanian (*resource based industries*). Banyak industri yang dibangun yang membutuhkan bahan baku dan komponen yang harus diimpor, atau industri-industri yang tidak banyak terkait dengan perekonomian lokal sehingga industri ini sangat rentan terhadap gejolak mata nilai uang. Industri-industri jenis ini pada umumnya adalah industri yang berpihak kepada golongan ekonomi kuat (Almasdi Syahza, 2005a).

Untuk merangsang pertumbuhan ekonomi di pedesaan khususnya Daerah Riau, kebijaksanaan ekonomi harus menganut paradigma baru dimana pemberdayaan ekonomi rakyat harus menjadi perhatian utama. Sebagian besar rakyat hidup pada sektor pertanian dan sektor ini masih memberikan kontribusi yang besar pada perekonomian daerah. Pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pembangunan sektor pertanian juga berarti membangun ekonomi daerah lebih baik.

Tanpa disadari sumber penghasilan penduduk Riau sebagian besar dari sektor pertanian, yaitu dari subsektor perkebunan, tanaman pangan, peternakan, dan hortikultura. Pertanian merupakan mata pencarian pokok masyarakat karena daerah ini memang sesuai untuk kegiatan pertanian terutama sub sektor perkebunan (kelapa sawit, karet). Dari sektor perkebunan menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan petani, karena dapat memberikan kontribusi yang tinggi terhadap pendapatan keluarga. Namun sebagian masyarakat yang tidak terlibat dalam kegiatan perkebunan kehidupannya sangat memprihatinkan, karena keterbatasan sumberdaya yang mereka miliki, antara lain: modal, tingkat pendidikan, dan keterbatasan pengetahuan mereka terhadap pemasaran produk pertanian. Dari sisi lain juga masih banyaknya daerah terisolir dan terbatasnya sarana transportasi. Hal ini menyebabkan sulitnya masyarakat petani untuk memasarkan produk mereka ke luar daerah (Almasdi Syahza, 2002b).

Guna mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan tersebut, maka perlu ditemukan

suatu alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh petani pedesaan. Dengan cara ini akan dapat membuka daerah pemasaran produk pertanian, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan.

Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Agroestat Kelapa Sawit

Pemerintah daerah Riau mengembangkan sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi pedesaan. Komoditi yang dikembangkan adalah kelapa sawit sebagai komoditi utama. Ada beberapa alasan kenapa Pemerintah Daerah Riau mengutamakan kelapa sawit, antara lain: *Pertama*, dari segi fisik dan lingkungan keadaan daerah Riau memungkinkan bagi pengembangan perkebunan kelapa sawit; *Kedua*, kondisi tanah yang memungkinkan untuk ditanami kelapa sawit menghasilkan produksi lebih tinggi dibandingkan daerah lain; *Ketiga*, dari segi pemasaran hasil produksi daerah Riau mempunyai keuntungan, karena letaknya yang strategis dengan pasar internasional yaitu Singapura; *Keempat*, daerah Riau merupakan daerah pengembangan Indonesia Bagian Barat dengan dibukanya kerjasama *Indonesia Malaysia Singapore Growth Triangle* (IMS-GT) dan *Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle* (IMT-GT), berarti terbuka peluang pasar yang lebih menguntungkan; dan *kelima*, berdasarkan hasil yang telah dicapai menunjukkan bahwa kelapa sawit memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani dibandingkan dengan jenis tanaman perkebunan lainnya (Almasdi Syahza, 2003b).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di daerah Riau membawa perubahan besar terhadap keadaan masyarakat pedesaan, khususnya masyarakat pendatang (transmigrasi), karena program pembangunan perkebunan kelapa sawit pada awalnya dikaitkan dengan program transmigrasi. Keberhasilan ini menjadi cambuk bagi masyarakat tempatan, sehingga animo masyarakat

tempatan untuk memiliki kebun kelapa sawit juga tinggi. Ini terbukti dengan tingginya permintaan terhadap lahan perkebunan. Di samping itu dengan berkembangnya perkebunan kelapa sawit juga merangsang tumbuhnya industri pengolahan yang bahan bakunya dari kelapa sawit. Kondisi ini menyebabkan tingginya mobilitas penduduk di daerah Riau terutama di daerah pengembangan perkebunan kelapa sawit.

Pembangunan perkebunan kelapa sawit mempunyai dampak ganda terhadap ekonomi wilayah, terutama sekali dalam menciptakan kesempatan dan peluang kerja. Pembangunan perkebunan kelapa sawit ini telah memberikan tetesan manfaat (*trickle down effect*), sehingga dapat memperluas daya penyebaran (*power of dispersion*) pada masyarakat sekitarnya. Semakin berkembangnya perkebunan kelapa sawit, semakin terasa dampaknya terhadap tenaga kerja yang bekerja pada sektor perkebunan dan sektor turunannya. Dampak tersebut dapat dilihat dari peningkatan pendapatan masyarakat petani, sehingga meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, baik untuk kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder (Almasdi Syahza, 2003a).

Cara yang paling efektif dan efisien untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah mengembangkan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat yaitu sektor agribisnis. Dengan perkataan lain, pembangunan ekonomi nasional yang memberikan prioritas pada pengembangan sektor agribisnis merupakan syarat keharusan bagi pemberdayaan ekonomi rakyat, bahkan pemberdayaan ekonomi nasional. Saat ini sektor agribisnis Indonesia memungkinkan untuk mampu bersaing guna merebut peluang pasar pada era perdagangan bebas. Di luar sektor agribisnis, bukan hanya sulit bersaing tetapi juga tidak mampu memberdayakan ekonomi rakyat. (Bungaran Saragih, 2001b). Pemihakan kebijakan pemerintah pada pengembangan sektor agribisnis di level makro perlu disertai dengan upaya mikro agar manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pengalaman lalu menunjukkan bahwa kontribusi yang besar sektor agribisnis dalam perekonomian nasional ternyata tidak diikuti peningkatan pendapatan petani yang memadai. Oleh karena itu, dalam upaya pemberdayaan ekonomi rakyat, keberpihakan pada pembangunan sektor agribisnis perlu disertai dengan suatu mekanisme yang menjamin bahwa manfaat pembangunan dapat dinikmati oleh rakyat.

Pengembangan perkebunan di pedesaan telah membuka peluang kerja bagi masyarakat yang mampu untuk menerima peluang tersebut. Dengan adanya perusahaan perkebunan, mata pencaharian masyarakat tempatan tidak lagi terbatas pada sektor primer dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, tetapi telah memperluas ruang gerak usahanya pada sektor tertier. Berbagai sumber pendapatan yang memberikan andil yaitu pedagang (dagang barang-barang harian, dagang karet, tiket angkutan dan penjual es), pegawai (guru, pemerintahan desa), industri rumah tangga (industri tahu, roti, usaha kusen, batu bata atau batako, dan percetakan genteng), angkutan pedesaan, buruh kasar, nelayan, pencari kayu di hutan dan tukang kayu.

Secara umum dapat diungkapkan bahwa adanya kawasan perkebunan telah menyebabkan munculnya sumber-sumber pendapatan baru yang bervariasi. Sebelum dibukanya kawasan perkebunan di pedesaan, sumber pendapatan masyarakat relatif homogen, yakni menggantungkan hidupnya pada sektor primer, memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia seperti apa adanya tanpa penggunaan teknologi yang berarti. Masyarakat hidup dari sektor pertanian sebagai petani tanaman pangan (terutama palawija) dan perkebunan (karet). Masyarakat di sekitar aliran sungai mata pencaharian sehari-hari pada umumnya sebagai nelayan dan pencari kayu di hutan. Selain teknologi yang digunakan sangat sederhana dan monoton sifatnya tanpa pembaharuan (dari apa yang mampu dilakukan). Orientasi usahanya juga terbatas kepada pemenuhan kebutuhan

keluarga untuk satu atau dua hari mendatang tanpa perencanaan pengembangan usaha yang jelas (subsisten).

Kegiatan pembangunan perkebunan telah menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi. Akibatnya di daerah-daerah sekitar pembangunan perkebunan muncul pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya daya beli masyarakat pedesaan, terutama terhadap kebutuhan rutin rumah tangga dan kebutuhan sarana produksi perkebunan kelapa sawit.

Apabila dikaji dari struktur biaya perusahaan perkebunan kelapa sawit yang teknis operasionalnya dirancang lebih banyak menggunakan teknik manual, biaya yang berkaitan dengan tenaga kerja langsung serta tenaga teknis di lapangan memiliki porsi yang cukup besar. Berdasarkan hal tersebut, perputaran uang yang terjadi di lokasi dalam jangka panjang diperkirakan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah ini dengan tumbuhnya perdagangan dan jasa. Hal ini memberikan arti bahwa kegiatan perkebunan kelapa sawit di pedesaan menciptakan *multiplier effect*, terutama dalam lapangan pekerjaan dan peluang berusaha.

Aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit yang melibatkan banyak tenaga kerja dan investasi yang relatif besar untuk industri hilirnya, diperkirakan secara positif merangsang, menumbuhkan dan menciptakan lapangan kerja serta lapangan berusaha. Melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan selama proses kegiatan perkebunan kelapa sawit dan pembangunan industri hilirnya akan mempunyai keterkaitan ke belakang (*backward linkages*). Pada proses kegiatan ini akan muncul antara lain jasa kontruksi, jasa buruh tani, jasa angkutan, perdagangan pangan dan sandang, perdagangan peralatan kerja serta bahan dan material yang dibutuhkan selama proses tersebut. Sedangkan pada kegiatan ekonomi waktu pascapanen dan proses produksi akan mempunyai keterkaitan ke depan (*foreward linkages*). Proses *foreward linkages* yang

diperkirakan akan muncul adalah sektor jasa, antara lain: angkutan, perhotelan, koperasi, perbankan, perdagangan, industri kecil di pedesaan yang memproduksi alat produksi pertanian (alsintan).

Indek pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit di Riau pada tahun 1995 hanya sebesar 0,49 yang berarti tingkat pertumbuhan kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,49 % (Tabel 1). Sementara pada tahun 1998 terjadi penurunan indeks kesejahteraan sebesar -1,09 %. Penurunan ini disebabkan kondisi ekonomi nasional pada waktu itu tidak menguntungkan, harga barang melonjak naik, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika menurun. Namun untuk tingkat golongan 80 % berpendapatan rendah mengalami peningkatan. Yang paling besar adalah golongan 20 % terendah. Ini disebabkan karena ketergantungan mereka terhadap produk luar (barang sektor modern sangat rendah). Mereka lebih banyak memakai barang sektor tradisional atau produksi lokal. Setelah ekonomi pulih kembali pada tahun 2004 indeks pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit meningkat lagi menjadi 1,72. Berarti pertumbuhan kesejahteraan petani kelapa sawit mengalami kemajuan sebesar 1,72 %. Pertumbuhan ini hanya dinikmati oleh kelompok yang berpenghasilan 40 % tertinggi sebesar 3,28 %, sedangkan kelompok 60 % terendah justru mengalami penurunan kesejahteraan sebesar -1,56 %.

Tabel 1. Pertumbuhan Indeks Kesejahteraan Petani Kelapa Sawit Di Daerah Riau

| Kelompok Pendapatan | 1995 ¹⁾ | | 1998 ²⁾ | | 2004 ³⁾ | |
|---|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|--------|
| | w | g | w | G | w | g |
| 20 % terendah | 0,081 | -0,008 | 0,151 | 0,071 | 0,117 | -0,034 |
| 20 % terendah kedua | 0,127 | 0,009 | 0,195 | 0,068 | 0,158 | -0,036 |
| 20 % terendah ketiga | 0,144 | -0,006 | 0,215 | 0,071 | 0,183 | -0,032 |
| 20 % terendah keempat | 0,196 | -0,012 | 0,201 | 0,006 | 0,211 | 0,010 |
| 20 % pendapatan tertinggi | 0,454 | 0,017 | 0,238 | -0,216 | 0,331 | 0,093 |
| Indeks Pertumbuhan Kesejahteraan | 0,49 | | -1,09 | | 1,72 | |

Sumber: 1) Almasdi Syahza, 1995

2) Almasdi Syahza, 1998

3) Hasil Survey, 2004

Hasil penelitian Almasdi Syahza (2004b) menunjukkan, aktivitas pembangunan perkebunan kelapa sawit memberikan pengaruh eksternal yang bersifat positif atau bermanfaat bagi wilayah sekitarnya. Manfaat kegiatan perkebunan ini terhadap aspek ekonomi pedesaan, antara lain: 1) Meningkatnya jumlah uang beredar di daerah pedesaan; 2) Memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha; 3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar; dan 4) Memberikan kontribusi terhadap pembangunan daerah.

Beberapa kegiatan yang secara langsung memberikan dampak terhadap komponen ekonomi pedesaan dan budaya masyarakat sekitar, antara lain: 1) Kegiatan pembangunan sumberdaya masyarakat desa; 2) Pembangunan sarana prasarana yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat setempat, terutama sarana jalan darat; 3) Penyerapan tenaga kerja lokal; 4) Penyuluhan pertanian, kesehatan dan pendidikan; dan 5) Pembayaran kewajiban perusahaan terhadap negara (pajak-pajak dan biaya kompensasi lain).

Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Riau dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar golongan masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar kabupaten/kota; dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi sebesar 2,48 dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan ((Almasdi Syahza, 2005b). Dari sisi daya dukung wilayah (DDL) terhadap industri hilir kelapa sawit juga tinggi yakni indek DDL sebesar 2,24. Angka ini menunjukkan ketersediaan bahan baku untuk pengembangan industri hilir kelapa sawit cukup tinggi. Dari dampak positif pembangunan perkebunan kelapa sawit tersebut, maka komoditi kelapa sawit dijadikan tanaman primadona masyarakat Riau. Tanaman ini bukan saja diminati oleh masyarakat pedesaan saja, melainkan juga dilakukan investasi di pedesaan bagi masyarakat perkotaan ((Almasdi Syahza, 2005a).

Mekanisme Kerja Agroestat Kelapa Sawit

Pesatnya perkembangan luas areal perkebunan rakyat khususnya swadaya murni, maka perlu dirancang suatu model

untuk menghindari ketimpangan pendapatan antara petani plasma dan swadaya. Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralkan dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti).

Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolahan tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Khusus untuk daerah Riau bentuk kegiatan ini sangat sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001, dimana pada pasal 12 ayat 6 dinyatakan hak petani peserta yaitu; memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS perusahaan inti.

Jaminan ketersediaan bahan baku secara kualitas, kuantitas maupun kontinuitas merupakan suatu keharusan untuk mencapai suatu agroindustri termasuk industri minyak sawit. Keterkaitan antara sumber penghasil bahan baku dan agroindustri kelapa sawit harus diintegrasikan ke dalam suatu pemilikan. Konsep kemitraan ini menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahatani maupun pabrik pengolahannya, di mana pengelolaannya dilakukan oleh koperasi petani.

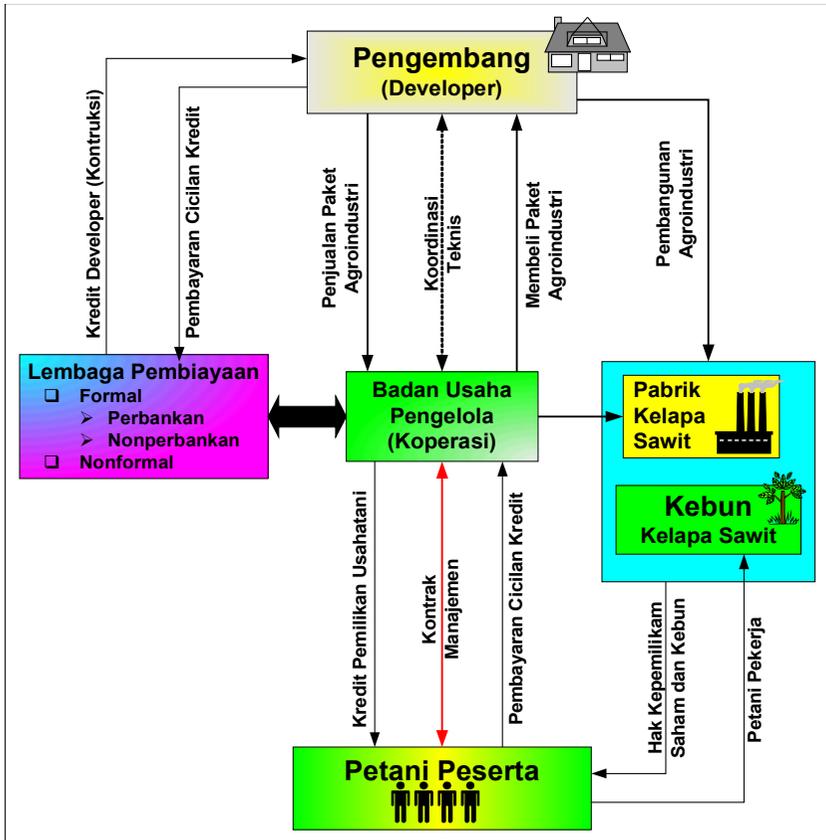
Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, di mana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha

pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Dalam model ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.

Konsep pembangunan perkebunan di pedesaan untuk masa datang, dirancang dalam bentuk kerja sama dengan perusahaan pengembang, yaitu: Agroestat Kelapa Sawit. Model ini merupakan pembangunan perkebunan berbasis kelapa sawit yang diperuntukkan bagi petani peserta baru. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga petani. Model ini merupakan pengembangan dari konsep agropolitan yang dicetuskan oleh Friedman dan Douglass (1976). Konsep agropolitan adalah salah satu strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Secara singkat konsep model agroestat kelapa sawit yang akan melibatkan masyarakat pedesaan disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Skema Konseptual Agroestat Kelapa Sawit di Pedesaan

1. Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.

2. Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.
3. Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan kesepakatan. Perusahaan jasa manajemen akan mengelola kebun dan pabrik dengan prinsip-prinsip manajemen perkebunan yang terbaik dan profesional.
4. Kepemilikan modal pabrik kelapa sawit (PKS) bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 2.
5. Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.
6. Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja, dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
7. Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan

pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.

Gambar 2 Rancangan Kepemilikan Modal Pada Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit di Pedesaan.

Lingkup kewenangan kerja dan tanggung jawab pelaku pada Model Agroestat Kelapa Sawit dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perusahaan Pengembang atau Developer

Pembangunan kebun kelapa sawit dilakukan oleh perusahaan pengembang atau developer yang telah berpengalaman di bidang perkebunan kelapa sawit. Pembangunan kebun ini juga termasuk pembangunan PKS lengkap dengan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam pengelolaan kebun maupun PKS. Tugas dan kewajiban dari developer, antara lain:

- (1) Melakukan survei/penelitian lapangan yang meliputi aspek kesesuaian lahan, teknologi yang dipakai, transportasi, komoditi yang dikembangkan, produk yang dihasilkan, keuangan atau sumber dana dan pemasaran.
- (2) Membuat studi kelayakan pembangunan perkebunan kelapa sawit meliputi pembangunan usahatani dan pabrik pengolahan untuk petani peserta.
- (3) Mempresentasikan studi kelayakan kepada pihak-pihak terkait antara lain kepada perbankan atau sumber dana, instansi pemerintah, calon konsumen dan lain-lainnya.
- (4) Melakukan negosiasi sehingga mencapai kesepakatan tentang kebutuhan dana dengan pihak perbankan atau sumber dana yang meliputi kredit untuk pembangun agroestat kelapa sawit (usahatani, pabrik) dan kredit untuk petani peserta berupa usahatani dan saham pabrik yang telah dibangun oleh developer dengan bunga (*interest*) yang layak usaha (*financial*).
- (5) Membangun paket kelapa sawit (meliputi usahatani dan pabrik pengolahan/industri) sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.
- (6) Merawat usahatani sampai usahatani tersebut menghasilkan.

- (7) Melakukan pemasaran (penjualan) unit usahatani, saham pabrik secara paket kepada masyarakat konsumen calon petani peserta.
- (8) Mengadakan koordinasi dengan Badan Usaha Pengelola (koperasi) dalam hal ini koperasi untuk memberlakukan persyaratan teknis dan administrasi dalam proses perawatan maupun penjualan paket unit usahatani, dan saham pabrik pengolah (industri).
- (9) Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

2. Badan Usaha Pengelola (Koperasi)

Secara umum mengikat kontrak manajemen dengan petani peserta yang di dalamnya memuat antara lain peraturan dan persyaratan sebagai berikut:

- (1) Badan Usaha Pengelola (koperasi) akan mengelola secara profesional untuk kemajuan usaha dan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi petani peserta.
- (2) Penentuan besarnya biaya jasa pengelolaan (fee) untuk koperasi.
- (3) Aturan-aturan pemutusan hubungan kontrak antara koperasi dengan petani peserta.
- (4) Perpindahan kepemilikan unit usahatani dan saham pabrik pengolahan (industri) harus sepengetahuan dan persetujuan koperasi.
- (5) Petani peserta tidak diperkenankan merubah jenis tanaman pokok, kecuali atas persetujuan koperasi.
- (6) Petani peserta menjual hasil panen usahatannya kepada pabrik pengolahan (industri) melalui koperasi.
- (7) Petani peserta akan membayar cicilan kredit sesuai jadwal melalui koperasi.
- (8) Petani peserta mengikuti pola perawatan usahatani dan tata cara panen sesuai dengan arahan koperasi.

Susunan organisasi koperasi secara teknis menyangkut dengan lingkup kerja badan usaha pengelola, antara lain:

- (1) Melaksanakan koordinasi dengan developer tentang pembangunan usahatani; perawatan usahatani; dan penjualan unit usaha.
- (2) Mempersiapkan dan melaksanakan manajemen usahatani.
- (3) Menjadikan dan mendistribusikan sarana produksi.
- (4) Mengatur tata cara panen, transportasi hasil panen ke pabrik.
- (5) Mengatur, membimbing dan membina keterampilan teknis perawatan dan panen usahatani.
- (6) Menampung, memproses dalam pabrik hasil usahatani, dan memasarkan produk akhir.
- (7) Memberlakukan dan melaksanakan prinsip-prinsip manajemen pabrik yang berorientasi pada efisiensi, efektivitas, produktifitas, dan peningkatan nilai tambah (*value added*).
- (8) Melaksanakan manajemen limbah dan lingkungan yang baik.

Menurut Setiadi Wijaya (2002), koperasi merupakan lembaga bisnis yang harus dikelola sebagaimana layaknya lembaga bisnis. Koperasi saat ini tidak mencerminkan sebetulnya usaha modern yang dikelola secara profesional, malah mencerminkan citra lembaga yang hanya cocok untuk orang miskin yang tidak memerlukan manajemen. Padahal koperasi merupakan entitas bisnis, manajemen koperasi diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Jika koperasi ingin maju, mau tak mau harus bermitra usaha dengan badan usaha lain yang mempunyai kepentingan saling menguntungkan. Kemitraan usaha ini perlu dilakukan untuk mendukung upaya membangun koperasi.

3. Lembaga Pembiayaan

Untuk pembangunan agroestat kelapa sawit harus ditunjang oleh lembaga perkreditan, yang tugasnya antara lain:

- (1) Menyediakan dana konstruksi kepada developer untuk pembangunan usahatani dan pabrik kelapa sawit.

- (2) Menyediakan kredit usahatani dan saham pabrik kepada petani peserta.
- (3) Membuat dan melaksanakan administrasi individual tabungan petani peserta, baik untuk *cost of living*, tabungan peremajaan dan tabungan petani peserta lainnya.
- (4) Melakukan pengawasan pengembalian kredit baik kredit usahatani maupun pemilikan saham PKS.

4. Petani Peserta

Setelah pembangunan kebun dan pabrik oleh pihak developer, petani berhak memiliki paket agribisnis kelapa sawit (kebun dan saham pabrik) melalui badan usaha pengelola (koperasi), dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Membeli paket yang terdiri dari unit usahatani dan saham PKS.
- (2) Memanfaatkan dan mengembalikan kredit usahatani, saham PKS yang disediakan bank yang telah ditunjuk oleh pengembang.
- (3) Mengikuti bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh koperasi dan oleh instansi pemerintah terkait.
- (4) Mengikat kontrak manajemen dengan koperasi dan mentaati peraturan dan persyaratan yang telah disepakati bersama.
- (5) Menjual hasil usahatani kepada pabrik melalui badan usaha (koperasi) dengan harga yang telah ditetapkan bersama.
- (6) Merawat usahatani dan lingkungan permukiman dengan semangat kerja keras dan berdasarkan bimbingan teknis dari koperasi.
- (7) Menunjuk wakil untuk menjadi komisaris di Badan Usaha Pengelola.

Di dalam model perusahaan agribisnis kelapa sawit terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama* kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer),

sedangkan yang *kedua* adalah bisnis usahatani kelapa sawit dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasil olahannya yang dilakukan oleh koperasi, yaitu suatu badan usaha jasa manajemen pengelola (sebagai operator atau administrator kebun dan pabrik).

Mengingat banyak pihak yang terlibat dalam bisnis pengembangan dan pengelolaan usaha kelapa sawit, antara lain: developer, badan usaha pengelola (koperasi), petani peserta, dan lembaga pembiayaan. Untuk itu diperlukan pengaturan mekanisme kerja yang baku/standar yang menjadi pedoman bagi pihak yang berkepentingan dalam bisnis kelapa sawit.

Gambar 3 Skema Konsepsi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Skala Kecil di Pedesaan

Pengusahaan agribisnis dengan komoditas kelapa sawit adalah pengusahaan yang mengintegrasikan kegiatan usahatani/budidaya, pengusahaan pabrik kelapa sawit ke dalam suatu kepemilikan yang menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahatannya maupun pabrik pengolahannya. Model pengusahaan pabrik kelapa sawit seyogyanya memperhatikan kapasitas produksi dari masing-masing kegiatan usaha, ketersediaan lahan (makin lama makin terbatas), ketersediaan industri pengolahan (terutama kapasitas produksi), dan besarnya biaya investasi.

Mengingat kebun kelapa sawit yang diusahakan oleh petani swadaya terletak secara berpencaran (tidak satu hamparan seperti petani kebun plasma), maka pembangunan PKS harus disesuaikan dengan luas kebun yang mendukung di suatu wilayah. Keserasian antara luasan areal usahatani dengan pabrik kelapa sawit disajikan pada Gambar 3.

Penutup

Untuk mewujudkan tujuan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program K2I, terutama di sektor pertanian maka perlu dipersiapkan kebijakan strategis untuk memperbesar atau mempercepat pertumbuhan sektor pertanian, khususnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah pengembangan agribisnis yang terencana dengan baik dan terkait dengan pembangunan sektor ekonomi lainnya.

Pembangunan industri hilir kelapa sawit harus dirancang dalam bentuk agroestat kelapa sawit. Konsep agroestat kelapa sawit merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan inti dengan petani peserta dalam bentuk kepemilikan kebun dan saham pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS.

Pembangunan agroestat yang dirancang harus mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. Kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.

Untuk merangsang investor melakukan investasi yang berbasis pedesaan, maka harus ada kebijakan pemerintah daerah terhadap kegiatan investasi tersebut. Kebijakan itu antara lain; memperpendek rantai birokrasi perizinan; membebaskan PPN dalam jangka waktu tertentu; atau pengurangan pemotongan pajak penghasilan. Sehingga biaya produksi dapat ditekan. Dari satu sisi pendapatan daerah berkurang, namun dari sisi lain pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pedesaan meningkat, akibat dari proses *multiplier effec* kegiatan agroestat kelapa sawit.

BAHAN RUJUKAN

- Almasdi Syahza., 1995. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Petani Peserta PIR-BUN Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Propinsi Riau*, Tesis Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 1998. *Evaluasi Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Strategi Pengembangannya di Daerah Riau*, Lembaga Penelitian Unri, Pekanbaru.
- ., 2001. *Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau*, PPKPEM Unri, Pekanbaru.
- ., 2002a. Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis Riau, dalam *Jurnal Kependudukan*, Vol 4 No 2, Juli 2002, Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung.
- ., 2002b. Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
- ., 2003a. Potensi Pembangunan Industri Minyak Goreng di Riau, dalam *Jurnal Sosiohumaniora*, Vol 5 No 1, Maret 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
- ., 2003b. Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agrostat Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th. VIII/02/November/2003. Jakarta: PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara.
- ., 2004a. Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani Di Pedesaan Daerah Riau, dalam *Jurnal Perspektif*, Vol 9 No 2, Desember 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

- ., 2004b. Analisis Disparitas Spasial dan Aliran Investasi Di Daerah Riau, dalam *Jurnal Indonesia Membangun*, STIE INABA, Vol 2 No 1 Maret-Juni 2004, Bandung.
- ., 2005a. Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit Di Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/01/Maret/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- ., 2005b. Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Bungaran Saragih, 2001a, *Suara Dari Bogor: Membangun Sistem Agribisnis*, Yayasan USESE, Bogor.
- ., 2001b, *Agribisnis: Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian*, Yayasan USESE, Bogor.
- Bustanul Arifin, 2001, *Spektrum Kebijakan Pertanian Indonesia*, Erlangga, Jakarta.
- Downey, W. David, Steven P Erickson, 1992, *Managemen Agribisnis*, Erlangga, Jakarta.
- Ellis. Frank., 1992, *Agricultural Policies in Developing Countries*, Cambrige University Press, New York.
- Friedman. John and Mike Douglass., 1976, *Pengembangan Agropolitan Menuju Siasat Baru Perencanaan Regional di Asia*, Lembaga Penerbit FE-UI, Jakarta.
- Meir. Gerald M, Joseph E. Stiglitz., 2001, *Frontiers of Development Economics The Future in Perspective*, Oxford University Press, New York.
- Moll. H. A. J, 1987., *The Economics of Oil Palm*, Pudoc, Wageningen Netherlands.

- Mudrajad Kuncoro., 2000. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- ., 2002. *Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- Setiadi Wijaya, N.H., 2002, Membangun Koperasi dari Mimpi Buruknya, dalam *Jurnal Usahawan Indonesia*, N0. 07/TH. XXXI Juli 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta,
- Todaro, Michael P., 2000. *Ekonomi Pembangunan di Dunia Ketiga*, Terjemahan oleh Haris Munandar, Edisi ke tujuh. Jakarta: Erlangga.
- Wiwik Suhartiningsih., 2003, Membangun Agroindustri Berbasis Kelapa Sawit, dalam *Jurnal Usahawan Indonesia* No 02/TH.XXXII Februari 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.
- Yuswar Zainal Basri., 2003, Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan, dalam *Jurnal Usahawan Indonesia* No 03/TH.XXXII Maret 2003, Lembaga Manajemen FE-UI, Jakarta.

Ucapan Terima Kasih

Rasa syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat dan kurnianya kepada saya. Allah telah memberikan rahmat dan kemudahan kepada saya selama ini. Salah satu rahmat Allah yang saya terima pada pagi ini adalah pengukuhan sebagai Guru Besar pada sidang Senat Universitas Riau yang berwibawa ini.

Allah tidak akan memberikan begitu saja rahmat dan kemudahan kepada saya untuk memperoleh jabatan tertinggi (Guru Besar) akademik tanpa diikuti oleh usaha dan bantuan dari segala pihak. Karena itu pada saat yang berbahagia ini, sangat pantaslah kiranya saya menyampaikan rasa terimakasih di depan para hadirin sekalian.

Rasa terima kasih saya secara pribadi dan keluarga disampaikan kepada Bapak Menteri Pendidikan Nasional melalui Bapak rektor Universitas Riau yang telah menetapkan dan mengangkat saya sebagai Guru Besar tetap di Universitas Riau.

Dengan penuh kerendahan hati, terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rektor Unri, Prof. Dr. Muchtar Ahmad, MSc dan segenap pimpinan atas segala perhatian, bantuan, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan sehingga saya ditetapkan sebagai Guru Besar Universitas Riau. Kalau bukan saya sebagai dosen Unri, hal ini mungkin belum atau tidak saya dapatkan. Atau kalau itu saya peroleh mungkin peluang dan kesempatannya pasti berbeda.

Kepada Dekan dan segenap pimpinan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unri saya menyampaikan rasa terima kasih, karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengembangkan karir sebagai staf pengajar di Program Studi Pendidikan Ekonomi. Pada hari ini saya dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang ilmu Ekonomi Pembangunan. Semoga apa yang saya raih ini akan menambah kinerja, pengabdian saya dalam

menyampaikan dan mengembangkan ilmu kepada mahasiswa dan segenab civitas akademika Universitas Riau.

Program Studi Agribisnis adalah bagian dari kehidupan kampus saya, karena itu tanpa mengurangi rasa hormat, saya juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Dekan Fakultas Pertanian dan Pembantu Dekan serta teman-teman sejawat di lingkungan Fakultas Pertanian, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berkiprah meniti karir.

Kepada seluruh Guru Besar di lingkungan Universitas Riau, saya berterima kasih karena telah bersedia menerima saya di dalam jajarannya dan memberi kepercayaan serta kehormatan kepada saya sebagai Guru Besar tetap dalam bidang Ekonomi Pembangunan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada teman, kawan, kerabat yang senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau, khususnya Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (PIPS). Tak lupa juga terima kasih kepada mahasiswa Program Studi Pendidikan Ekonomi dan mahasiswa Program Studi Agribisnis. Dorongan dan doa Anda telah mengantarkan karir saya selama ini, semoga Allah Swt membalasnya. Tanpa anda semua tidak mungkin saya meraih jabatan tertinggi ini di Universitas Riau.

Pada sidang yang berwibawa ini, saya menyampaikan rasa terima kasih dari lubuk hati yang dalam kepada Bapak Drs. H. Agus Muhammad. Beliaulah yang memberikan dorongan kepada saya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 dan S3. Masih segar di ingatan saya, Beliau berkata setelah saya pulang dari pendidikan S2 (tahun 1995), 'kau boleh punya kantor empat puluh di luar Unri, tapi nama kau jangan hilang di daftar nama dosen Pendidikan Ekonomi', Alhamdulillah dan Insyaallah saya akan tetap menjadi dosen Pendidikan Ekonomi Universitas Riau.

Izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih saya yang tertinggi kepada kedua orang tua saya Ayahanda Syahbuddin (alm) dan Ibunda Zainab (almh). Sebagai anak tunggal, saya tidak pernah dimanja, selalu diajarkan menghargai waktu, dididik dengan kedisiplinan yang tinggi, selalu bersikap jujur dan taat menjalankan perintah Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Kedua orang tua saya adalah sosok guru SD yang disiplin dan selalu meyakinkan saya, bahwa menuntut ilmu itu adalah modal kehidupan. Masih terngiang di telinga saya, apabila saya bolos sekolah, Ibunda selalu marah dan mengeluarkan ucapan "kamu disuruh sekolah bukan untuk menjadi camat dan bupati, tetapi supaya menjadi orang yang berilmu, itulah kekayaan yang saya tinggalkan untukmu. Alhamdulillah, pada sidang yang berwibawa ini keinginan dari kedua orang tua saya terwujud, yakni saya dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap Universitas Riau.

Pada sidang yang terhormat ini saya juga menyampaikan rasa terima kasih yang sangat dalam kepada keluarga saya tercinta. Adinda Dra Mitri Irianti, MSi yang selama ini telah mendampingi saya dalam menjalin rumah tangga, memberikan motivasi kepada saya untuk selalu mengabdikan, berkarya, berkreasi sebagai layaknya seorang staf pengajar. Di samping sebagai istri, di kampus dia juga berfungsi sebagai teman diskusi, tukar pendapat. Ada kalanya kami diskusi menemui jalan buntu, karena tidak ada kecocokan ilmu (Fisika dan Ekonomi). Selama saya meniti karir, dia yang membangunkan saya jika saya tertidur, dia yang mengejutkan saya jika saya terlena pada tugas saya sebagai dosen. Adinda Mitri, sosok istri penyejuk, pendorong dan sumber inspirasi dalam karir dan rumah tangga saya. Bahkan selama saya kuliah (S2 dan S3) dia telah menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga serta mendidik anak-anak saya yang seharusnya kita lakukan berdua. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya untuk Adinda. Semoga Allah memberikan pahala yang berlipat ganda kepada adinda.

Begitu juga ananda tersayang Brilliant A.Smit, Honest A.Smit, dan Putri Fadhillah A.Smit yang selalu mendoakan agar papa selalu sukses. Di kala papa sibuk, kalian mungkin merasa kasih sayang dari papa terabaikan, atau mungkin kalian mendapatkan kasih sayang yang tidak seimbang, namun semuanya itu untuk kita semua. Jadikanlah hari yang berbahagia ini sebagai cambuk untuk belajar lebih rajin dan giat, semoga Ananda kelak menjadi orang yang berilmu pengetahuan.

Yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua keluarga (baik keluarga saya maupun keluarga istri saya), kakak-kakak, adik-adik, keponakan yang telah memberikan bantuan moril maupun materil serta doa, sehingga saya dikukuhkan sebagai Guru Besar tetap Universitas Riau. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang setimpal.

Pada hadirin yang berbahagia, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan tingkah laku saya, baik cara saya berbicara, maupun tutur kata yang kurang sopan.

*Lancang kuning berlayar malam
Nakhodanya anak melayu
Dari lubuk hati yang paling dalam
Saya mohon maaf atas sikap dan tingkah laku*

Wabillahi Taufik Wal Hidayah, assalamualaikum w.w

RIWAYAT HIDUP

Nama : Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP.
NIP : 131 877 924
Tempat/Tgl Lahir : Tanah Datar/ 22 Agustus 1960
Pekerjaan : Dosen Tetap Universitas Riau
Pangkat / Gol : Pembina / IV.a
Jabatan Fungsional : Guru Besar
Jabatan Struktural : Sekretaris Lembaga Penelitian (Lemlit)
Universitas Riau
Agama : I s l a m
Alamat Kantor : Gedung Lemlit Universitas Riau
Kampus Binawidya – Panam Km 12,5
Pekanbaru. 28293
Telepon: (0761) 567093
Alamat Rumah : Jl. Purwodadi No. 151 Sidomulyo Barat
Pekanbaru. 28294
Telepon (0761) 64167; 0812 75 33089
e-mail: syahza@telkom.net
asyahza@yahoo.co.id
Keluarga : Istri, Dra. Mitri Irianti, MSi
Anak, Brilliant A.Smit
Honest H. A.Smit
Putri Fadhillah A.Smit

Pendidikan :

- ❑ Sarjana Ekonomi (Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bung Hatta Padang, tahun 1986
- ❑ Magister Pertanian (Sosial Ekonomi dan Pembangunan Pertanian) tahun 1993-1995, Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.
- ❑ Program Doktor (S3) Bidang Ilmu Pertanian (Bidang Kajian Ekonomi Pedesaan) tahun 2001-2004, Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung.

Riwayat Kepangkatan/Jabatan

| NO | URAIAN | Terhitung Mulai | GOL |
|-----------|----------------------|------------------------|------------|
| 1 | Calon PNS | 1 Februari 1990 | IIIa |
| 2 | Asisten Ahli Madya | 1 November 1991 | IIIa |
| 3 | Pegawai Negeri Sipil | 1 November 1991 | IIIa |
| 4 | Asisten Ahli | 1 April 1994 | IIIb |
| 5 | Lektor Muda | 1 November 1995 | IIIc |
| 6 | Lektor Madya | 1 Maret 1998 | IIId |
| 7 | Lektor (Impassing) | 1 Januari 2001 | III.d |
| 8 | Lektor Kepala | 1 Juli 2001 | IVa |
| 9 | Guru Besar | 1 Mei 2005 | IVa |

PENELITIAN

1. Analisis Disparitas Spasial Regional Daerah Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1997
2. Inventarisasi Peluang Agrobisnis dan Agroindustri di Wilayah Riau, Bapeda Tingkat I Propinsi Riau, Tahun 1997
3. Kajian Strategi Pengembangan dan Koordinasi Pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Intensifikasi, Bimas Tingkat I Propinsi Riau, Tahun 1997
4. Peluang Pengembangan Agribisnis di Daerah Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1998
5. Dampak Sosial Ekonomi Pengembangan PMDN dan PMA Terhadap Masyarakat Sekitar di Propinsi Riau, BKPM Daerah Riau, Tahun 1998
6. Evaluasi Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit dan Strategi Pengembangannya di Daerah Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1998
7. Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1998

8. Analisis Dampak Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Perekonomian Daerah Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1998
9. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Bengkalis, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1999
10. Studi Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dalam Hubungannya dengan Program Transmigrasi di Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Kampar, Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Tahun 1999
11. Evaluasi Pelaksanaan PIR TRAN di Daerah Transmigrasi Propinsi Riau, Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Tahun 1999
12. Evaluasi Usahatani Terapan di Daerah Transmigrasi Propinsi Riau, Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Tahun 1999
13. Studi Pengembangan Buah-buahan Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Kampar, LPIU – Due Project Universitas Riau, Tahun 2000
14. Perbaikan Proses Pembelajaran Mata Kuliah Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau, LPIU– Due Project Universitas Riau, Tahun 2000
15. Studi Pengembangan Agro Estat Kelapa Sawit Skala Kecil di Kawasan Permukiman Transmigrasi Propinsi Riau, Departemen Transmigrasi Propinsi Riau, Tahun 2000.
16. Pembuatan Alat Penjernih Air Payau di Daerah Selat Panjang Kabupaten Bengkalis, PT Perkebunan Nusantara V Pekanbaru, Tahun 2000
17. Prastudi Kelayakan Prospek Pengembangan Industri Hilir Minyak Kelapa Sawit (CPO) di Kabupaten Palalawan, Proyek Perencanaan Penanaman Modal Daerah Palalawan, Tahun 2000

18. Dampak Pengembangan Perkebunan Swasta Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Indragiri Hulu, DUE Project Unri, Tahun 2000
19. Prospek Pengembangan Industri Hilir Minyak Kelapa Sawit (CPO) di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Pelalawan, Tahun 2000.
20. Informasi Ekonomi Masyarakat Kabupaten Pelalawan, Pemda Kabupaten Pelalawan, Tahun 2000.
21. Kajian Sosial Ekonomi Usahatani Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau, Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Riau, Tahun 2001
22. Penelitian dan Pengembangan Agribisnis di Kabupaten Karimun Propinsi Riau, Pusat Pengkajian Koperasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Universitas Riau, Tahun 2001
23. Studi Sosial Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Riau, PPKPEM Universitas Riau,, Tahun 2001
24. Studi Kelayakan Hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara di Kabupaten Siak, P2TP2 Universitas Riau, Tahun 2002.
25. Studi Kelayakan Hutan Tanaman Industri PT Rokan Permai Timber di Kabupaten Siak, P2TP2 Universitas Riau, Tahun 2002.
26. Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Lingkungan Kumuh Sekitar Sungai Siak, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2002.
27. Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, PT Bina Daya Bintara, Tahun 2002.
28. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Di

- Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, Tahun 2002.
29. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Bina Daya Bintara Di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, Tahun 2002.
 30. Analisis Dampak Lingkungan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri PT Rokan Permai Timber Di Desa Sam-Sam Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, PT Rokan Permai Timber, Tahun 2002.
 31. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Rokan Permai Timber di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, Tahun 2002.
 32. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman PT Rokan Permai Timber di Kecamatan Minas Kabupaten Siak Propinsi Riau, Tahun 2002.
 33. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan, kerjasama WWF dengan PPKPEM Unri, Pekanbaru. Tahun 2003
 34. Rencana Teknik Lapangan: Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Sub Daerah Aliran Sungai Batang Kuantan dan Sekitarnya Di Riau, Kerjasama Departemen Kehutanan Dengan P2LPW Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2003.
 35. Rencana Teknik Lapangan: Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Sub Daerah Aliran Sungai Peranap Di Riau, Kerjasama Departemen Kehutanan dengan P2LPW Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2003.
 36. Pengembangan Dunia Usaha Untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2004.

37. Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit untuk Percepatan Pembangunan Ekonomi Pedesaan Daerah Riau. Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2004.
38. Pengembangan Koperasi Untuk Percepatan Peningkatan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Indragiri Hulu, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2004.
39. Masterplan Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir, Bappeda Kabupaten Rokan Hilir, Tahun 2004.
40. Rencana Teknik Lapangan: Rehabilitasi Lahan Dan Konservasi Tanah Sub Daerah Aliran Sungai Tapung Kanan dan Tapung Kiri di Riau, Kerjasama Departemen Kehutanan dengan Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2005.
41. Survei dan Pemetaan Potensi Pemakaian Gas di wilayah Rokan Hilir, Dumai, dan Bengkalis, Kerjasama PT Perusahaan Gas Negara dengan Lembaga Penelitian Universitas Riau, Pekanbaru, Tahun 2005.

PUBLIKASI

1. Jurnal Penelitian: Perkembangan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Volume VII No. 2, Desember 1998, Pekanbaru.
2. Inti Sari Hasil Penelitian: Dampak Pengembangan Pola PIR Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian Regional Riau, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1999, Pekanbaru.
3. Majalah Semi Ilmiah Madani: Peluang Pengembangan Agribisnis di Riau, Februari 1999, Pekanbaru.
4. Prosiding Seminar Hasil Penelitian: Analisis Location Quotient (LQ) Perkebunan Kelapa Sawit di Daerah Riau,

Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1998, Pekanbaru.

5. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Ilmu-ilmu Pertanian: Analisis Dampak Investasi Terhadap Sosial Ekonomi Petani Peserta Plasma dan Masyarakat Sekitar di Riau, Kerjasama Perguruan Tinggi Wilayah Barat, Tahun 1999, Pekanbaru.
6. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Universitas Riau: Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Bengkalis, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 1999, Pekanbaru
7. Jurnal Penelitian: Kajian Tentang Pengalihan Kepemilikan Kebun Kelapa Sawit Plasma Pirsus PTPN V Sei. Tapung, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Volume VIII No. 2, Desember 1999, Pekanbaru.
8. Jurnal Penelitian: Dampak Kegiatan PMA dan PMDN Terhadap Ekonomi Masyarakat Sepanjang Daerah Perairan, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Volume IX No 1, Juni 2000, Pekanbaru.
9. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Universitas Riau: Studi Potensi Pengembangan Buah-buahan Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Kampar, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2000, Pekanbaru
10. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Universitas Riau: Dampak Pengembangan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit Swasta Terhadap Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Kuantan Singingi, dalam *Pengelolaan Sumberdaya Alam Riau*, P2KP2 Unri, Tahun 2001, Pekanbaru.
11. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial (Terakreditasi): Studi Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar Kawasan Industri di Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau, dalam *Mon Mata*, Lembaga Penelitian Universitas Syiah Kuala, Nomor 43, September 2001. Banda Aceh.

12. Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial: Peluang Pengembangan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil di Daerah Riau, dalam *Sosial*, Volume 1 No 2, September 2001, Lembaga Penelitian Universitas Merdeka, Medium.
13. Prosiding Seminar Hasil Penelitian Universitas Riau: Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis, Lembaga Penelitian Universitas Riau, Tahun 2002, Pekanbaru.
14. Majalah Ilmiah Ilmu Ekonomi dan Manajemen: Studi Pengembangan Buah-buahan Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis di Kabupaten Kampar, dalam *Distribusi*: Edisi Ke XVII Tahun XI Juni 2002, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram, Mataram.
15. Majalah Ilmiah Usahawan Indonesia (Terakreditasi): Potensi Pembangunan Industri Hilir Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Usahawan Indonesia*, No. 04/TH XXXI April 2002, Lembaga Manajemen FE UI, Jakarta.
16. Jurnal Kependudukan Padjadjaran (Terakreditasi): Potensi Pengembangan Desa Tertinggal dan Mobilitas Penduduk di Kabupaten Bengkalis, dalam *Kependudukan*, Vol 4 No.2, Juli 2002, Universitas Padjadjaran, Bandung.
17. Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora (Terakreditasi): Prospek Pembangunan Industri Minyak Goreng di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5, No. 1, Maret 2003, Universitas Padjadjaran, Bandung.
18. Jurnal Penelitian: Perkembangan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi, dalam *Jurnal Indonesia Membangun*, Vol 2, No. 1, Maret 2003, STIE INABA, Bandung.
19. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi): Paradigma Baru Pemasaran Produk Pertanian Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, TH. VIII/01/Juli/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

20. Jurnal Penelitian (Terakreditasi): Perkembangan Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 5 No 2, Juli 2003, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
21. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi (Terakreditasi): Analisis Ekonomi Usahatani Hortikultura Sebagai Komoditi Unggulan Agribisnis Di Kabupaten Pelalawan, Propinsi Riau, dalam *Perspektif*, Vol 8 No 1, Juni 2003, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
22. Jurnal Pembangunan Pedesaan: Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Berbasis Agribisnis di Daerah Riau, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Volume 3 Nomor 2 November 2003, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
23. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi): Rancangan Model Pemberdayaan Ekonomi Pedesaan Melalui Pembangunan Agroestat Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.VIII/02/November/2003, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
24. Jurnal Penelitian: Analisis Disparitas Spasial dan Aliran Investasi Di Daerah Riau, dalam *Jurnal Indonesia Membangun*, STIE INABA, Vol 2 No 1 Maret-Juni 2004, Bandung.
25. Jurnal Pembangunan Pedesaan (Terakreditasi): Distorsi Harga Tandan Buah Segar (TBS) Kelapa Sawit dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Petani Di Pedesaan, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Universitas Jenderal Soedirman, Vol 4 No 1 April-Juli 2004, Purwokerto.
26. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi): Ekspor CPO (Crude Palm Oil) dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th IX/01/Juli/2004,

PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara,
Jakarta.

27. Jurnal Pembangunan Pedesaan (Terakreditasi): Dampak Kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Sekitar di Kabupaten Siak, dalam *Jurnal Pembangunan Pedesaan*, Universitas Jenderal Soedirman, Vol 4 No 2 Agustus-November 2004, Purwokerto.
28. Jurnal Penelitian (Terakreditasi): Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan Melalui Pengembangan Industri Hilir Berbasis Kelapa Sawit di Daerah Riau, dalam *Sosiohumaniora*, Vol 6 No 3, November 2004, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran, Bandung.
29. Jurnal Ekonomi Pembangunan, Manajemen dan Akuntansi (Terakreditasi): Kelapa Sawit dan Kesejahteraan Petani Di Pedesaan Daerah Riau, dalam *Perspektif*, Vol 9 No 2, Desember 2004, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
30. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi): Analisis Daya Dukung Wilayah Terhadap Industri Hilir Kelapa Sawit Di Riau, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/01/Maret/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.
31. Jurnal Ekonomi (Terakreditasi): Dampak Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Terhadap *Multiplier Effect* Ekonomi Pedesaan, dalam *Jurnal Ekonomi*, Th.X/03/November/2005, PPD&I Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanagara, Jakarta.

Pekanbaru, 14 Januari 2006

Prof. Dr. Almasdi Syahza, SE., MP.

NIP. 131 877 924